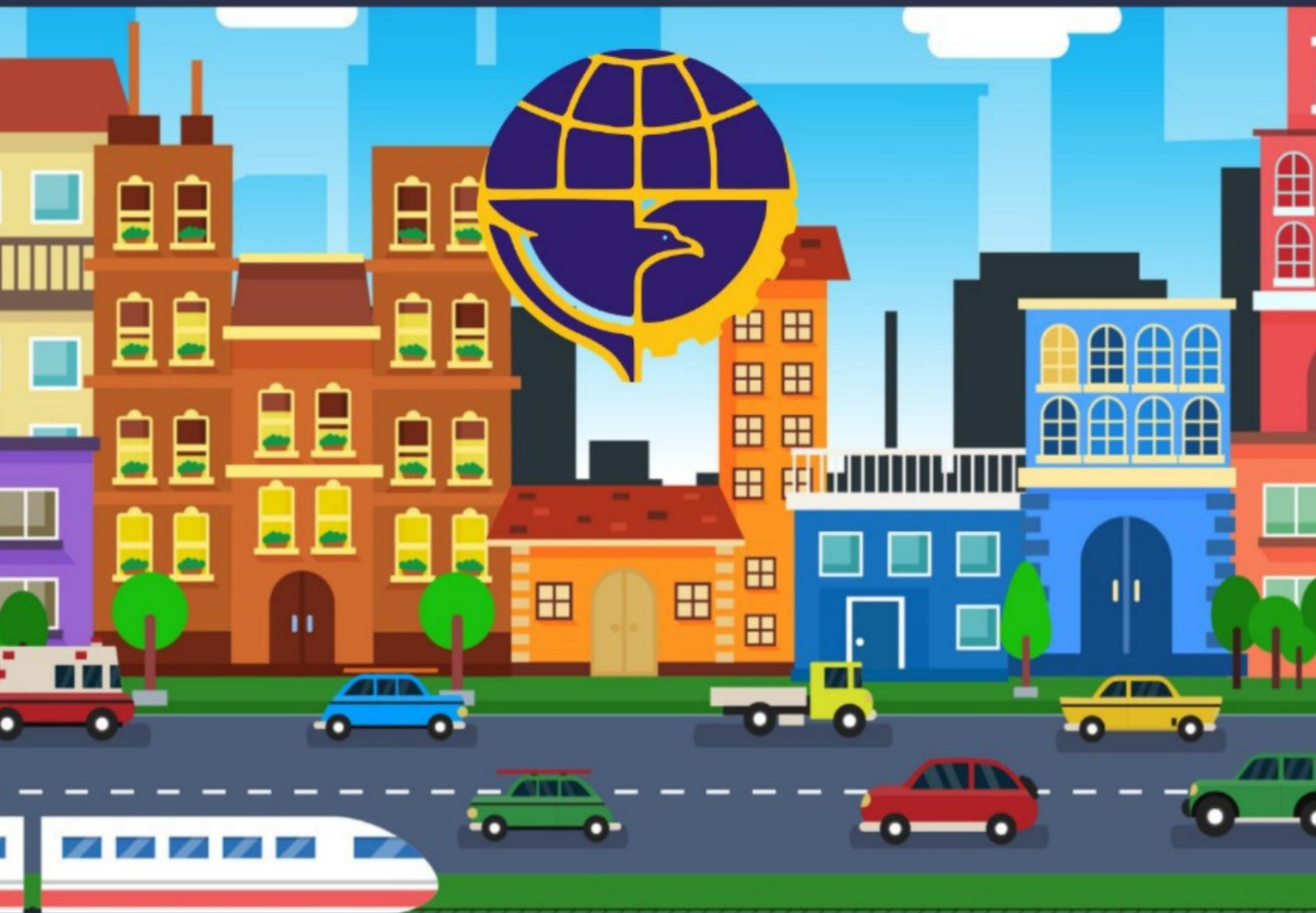


DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

LKjLP

TAHUN 2025



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kenari No. 110 Telp. (0342) 801989 Fax. (0342) 815441

Situs web : <http://dishub.blitarkota.go.id> E-mail : dishub@blitarkota.go.id

BLITAR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 dengan baik. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 ini merupakan laporan rutin yang disusun setiap tahun sekali, dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Disamping itu LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai serta aspek keuangan yang secara langsung meningkatkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam konteks pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, akan tetapi masih banyak juga permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis

dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang perhubungan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan serta Visi dan Misi Kota Blitar.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Blitar ini, agar dapat bermanfaat untuk bahan referensi pengambilan kebijakan/keputusan dalam menetapkan program dan kegiatan disektor transportasi yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun-tahun mendatang. Kami mengharap saran dan kritik yang membangun unrtuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Perhubungan.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...

Blitar, 9 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar

EDI WINARNO, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197001251991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Dinas Perhubungan menjalankan beberapa fungsi diantaranya yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian serta pelayanan umum di bidang perhubungan.

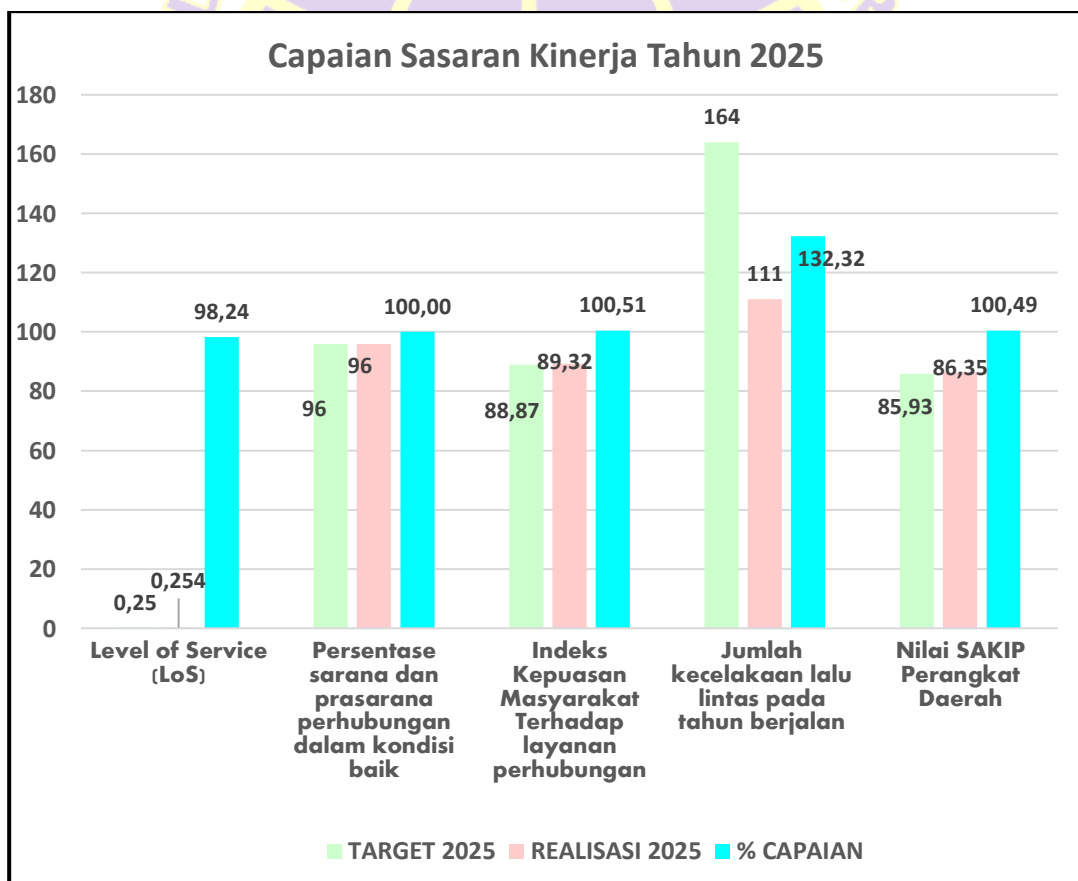
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dalam membangun Kota Blitar 5 (lima) tahun yang akan datang terdapat visi dan beberapa misi daerah yang diemban dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 yang mengakomodir urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI IV : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Perhubungan

Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD diatas, maka dapat ditentukan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

TUJUAN RENSTRA 2021-2026 : 1. Meningkatnya Kualitas Perhubungan 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
SASARAN RENSTRA 2021-2026 : 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi 4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Adapun pencapaian Kinerja Sasaran dapat ditunjukkan pada tabel berikut:



Dalam pencapaian kinerja tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Blitar terdapat 4 (empat) indikator sasaran kinerja yang tercapai dan 1 (satu) indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai. Indikator sasaran kinerja yang tercapai yaitu :

- 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada indikator ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:
 - ❖ Faktor pendukung: Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, dokumen laporan kinerja telah tersusun tepat waktu dan menggambarkan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
 - ❖ Faktor penghambat: Kurangnya optimalisasi pencapaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan. Pada indikator sasaran kinerja ini juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:
 - ❖ Faktor pendukung: Tata cara pelayanan yang dibakukan mudah, kesesuaian biaya dengan peraturan dan transparansinya, pengelolaan tindak lanjut keluhan/ aduan berjalan optimal.
 - ❖ Faktor penghambat: Kecepatan jangka waktu pelayanan kurang optimal, sarpras/fasilitas pendukung pelayanan kurang memadai dan kurangnya kompetensi/kemampuan petugas pemberi layanan.
- 3) Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada indikator sasaran kinerja ini juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:
 - ❖ Faktor pendukung: Kebijakan pimpinan terkait pengendalian angka kecelakaan lalu lintas di Kota Blitar dalam mengimplementasikan manajemen rekayasa lalu lintas.
 - ❖ Faktor penghambat: Belum optimalnya sarana prasarana

perhubungan dan fasilitas keselamatan sesuai standar serta kurangnya sosialisasi kelalulintasan terhadap pengguna jalan.

4) Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik.

Pada indikator sasaran kinerja ini ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:

- ❖ Faktor pendukung: penyediaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan program prioritas urusan perhubungan.
- ❖ Faktor penghambat: Masih terdapatnya beberapa ruas jalan yang belum dilengkapi perlengkapan jalan sesuai standar, belum tersedianya data kebutuhan perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan serta kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga asset bersama (APILL, perambuan dan fasilitas keselamatan lainnya) sehingga masih terdapat kerusakan di beberapa ruas jalan serta terjadinya vandalisme/pencurian.

Adapun Indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai adalah:

1) Level of Service (LoS). Pada indikator sasaran kinerja ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu:

- ❖ Faktor pendukung: SDM yang berkompeten dan kebijakan pimpinan dalam upaya peningkatan layanan jalan dengan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas.
- ❖ Faktor penghambat: Ketidakseimbangan kapasitas jalan, kurangnya disiplin pengguna jalan serta kurang optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (APILL dan perambuan) di beberapa ruas jalan serta

Untuk menyikapi hal tersebut, maka untuk tahun 2026 direncanakan untuk mengalokasikan anggaran guna penyediaan sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas keselamatan lainnya.

Setelah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas

Perhubungan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 berikut target dan realisasi kinerja serta anggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		% Capaian		Efisiensi
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LoS)	0,25	12.499.516.603,41	0,254	11.641.474.687,00	98,24	93,14	1,05
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	96	6.593.107.832,61	96	6.082.830.084,00	100	92,62	1,08
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	88,87	3.339.093.428,80	89,32	3.058.267.802,00	100,51	91,59	1,10
Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	164	2.567.315.342,00	111	2.500.376.801,00	132,32	97,39	1,36
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,93	7.340.150.024,59	86,35	6.863.189.607,00	100,49	93,50	1,07

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran 1, *Meningkatnya kualitas perhubungan* dikatakan efisien, karena untuk mencapai kinerja sebesar 98,24% dibutuhkan anggaran sebesar 93,14%. Untuk sasaran 2, *Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan* dikatakan efisien, karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dibutuhkan anggaran sebesar 92,62%. Untuk sasaran 3, *Meningkatnya kualitas layanan perhubungan* dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,51% membutuhkan anggaran sebesar 91,59%. Untuk sasaran 4, *Meningkatnya keselamatan transportasi* dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 132,32% membutuhkan anggaran sebesar 97,39%. Dan untuk sasaran 5, *Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah* juga dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,49% dibutuhkan anggaran sebesar 93,50%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	10
C. Maksud dan Tujuan	15
D. Dasar Hukum.....	15
E. Aspek – Aspek Strategis.....	18
F. Isu – Isu Strategis.....	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP tahun 2024.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	32
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	33
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025	49
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.....	53
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM).....	54
B. Akuntabilitas Keuangan	57
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	64
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	65
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73

C. Prestasi / Penghargaan	75
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Langkah Perbaikan.....	78

Lampiran-lampiran

- I. Matrik Rencana Strategi OPD Tahun 2021-2026
- II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2025
- III. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- IV. Pengukuran Kinerja Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang disertai dengan beberapa penjelasan atas pencapaian tersebut. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

I. Kedudukan

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka

Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan:

- 1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretris Daerah.

II. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Peraturan Walikota blitar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

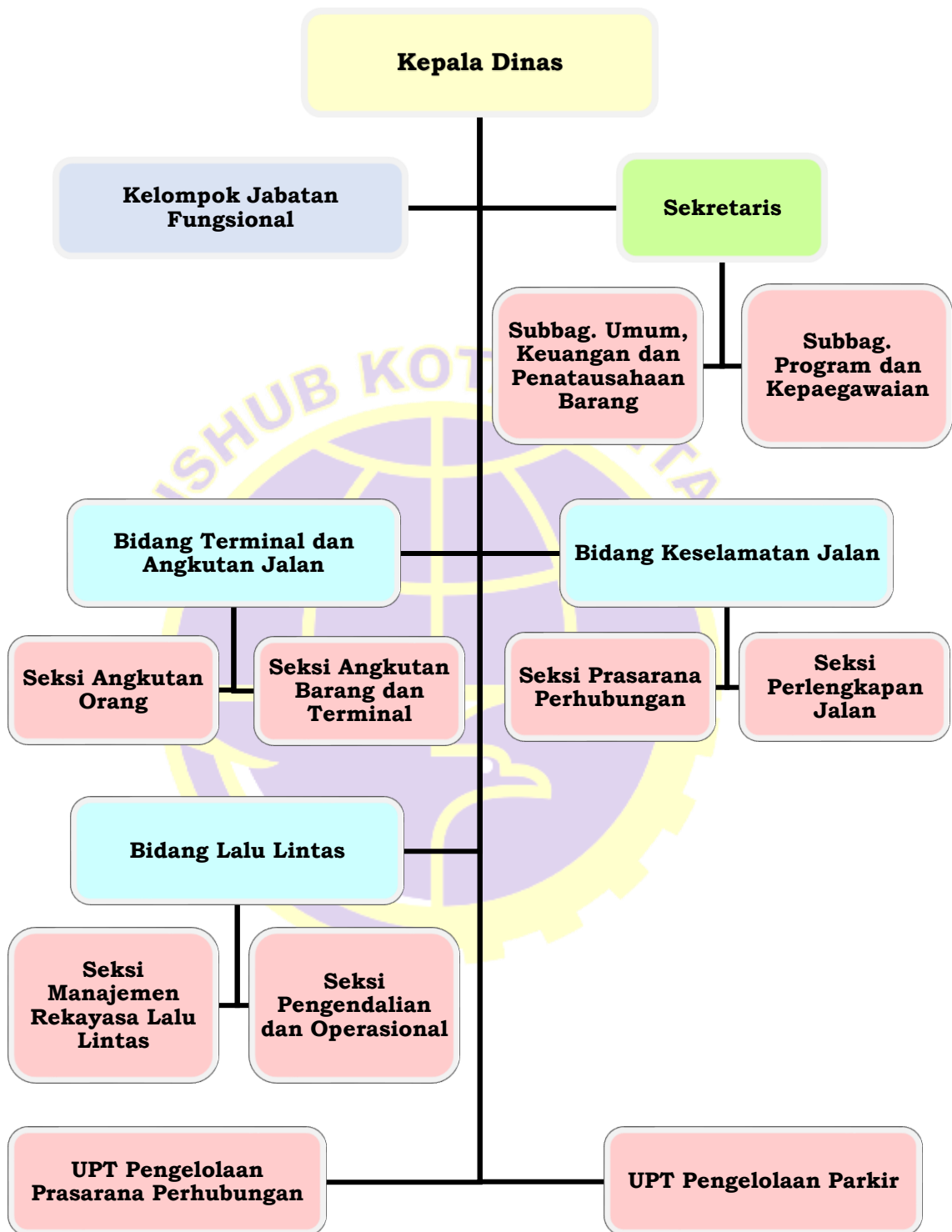
1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pengkoordinasian dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;

7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, dan sarana prasarana kerja;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di dalam lingkungan kantor;
10. Penyusunan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan IKM;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perhubungan secara berkala melalui *sub dominan website* Pemerintah Daerah dan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai kewenangan:
 - a. Penetapan kebijakan operasional di bidang Perhubungan;
 - b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Perhubungan;
 - c. Perencanaan operasional program Perhubungan;
 - d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional Perhubungan, di tingkat kota;

- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang Perhubungan;
- f. Peremajaan data dalam bidang Perhubungan untuk tingkat kota;
- g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perhubungan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2025 dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Aspek – Aspek Strategis

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yaitu “KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat” yang kemudian dituangkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya mengemban salah satu misi yaitu misi empat: “Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”. Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut dan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Blitar yang senantiasa membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, dimana ini merupakan suatu tantangan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi. Dengan perkembangan

transportasi tersebut maka terdapat beberapa aspek strategis pengembangan yaitu:

1. Pengembangan perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan seperti menerapkan PJU LED yang ramah lingkungan dan hemat energi;
2. Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan penggalakan sosialisasi kelalulintasan melalui program SI BINTANG;
3. Penglolaan terminal tipe C;
4. Peningkatan layanan angkutan sekolah gratis dengan pengembangan aplikasi SIDABUS;
5. Peningkatan layanan uji berkala kendaraan bermotor;
6. Pengelolaan parkir tepi jalan umum.

Selain aspek strategis diatas, Dinas Perhubungan Kota Blitar juga melakukan pengelolaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan; 3) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

F. Isu – Isu Strategis

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dan kepentingan dari berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil-hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal, oleh sebab itu perencanaan transportasi di suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Melihat kondisi diatas maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, sehingga perlu penyediaan fasilitas utama maupun pendukung berdasarkan kebutuhan atas hasil kajian yang disusun sebelumnya;

2. Belum Optimalnya sistem pengelolaan parkir. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa parkir tepi jalan umum dan rendahnya tingkat disiplin juru parkir dalam melakukan prosedur parkir di tepi jalan. Sehingga sangat perlu sekali untuk diadakan sosialisasi terhadap pengguna parkir di tepi jalan umum serta pembinaan terhadap juru parkir secara berkala dalam rangka peningkatan kinerja dan PAD dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum.
3. Belum optimalnya keselamatan jalan menuju smart city khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas keselamatan, sehingga perlunya peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan;
4. Belum optimalnya pelayanan lalu lintas jalan, sehingga perlunya dilaksanakan sosialisasi tentang kesadaran berlalu lintas kepada pengguna jalan, agar tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Blitar dapat di minimalisasi selain itu juga perlunya manajemen rekayasa lalu lintas dalam menjaga kestabilan arus jalan sehingga tidak menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan;
5. Belum optimalnya pelayanan uji kendaraan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kendaraan secara berkala. Sehingga perlunya sosialisasi kepada pemilik kendaraan wajib uji akan pentingnya kendaraan laik jalan. Disisi lain untuk peningkatan layanan uji berkala juga dibutuhkan alat uji yang sesuai standar, layak dan terkalibrasi secara berkala, sehingga kedepan perlu adanya penambahan, pemeliharaan dan kalibrasi alat uji secara berkala, agar layanan uji kendaraan tetap berjalan prima sesuai SOP yang ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif dalam kurung waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Periode Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai keterkaitan dengan misi empat yaitu **“Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”**.

Berdasarkan misi Kepala Daerah tersebut, maka ditetapkanlah satu tujuan dengan tiga sasaran. Dan Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas

rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, masing-masing dikembangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Adapun strategi dimaksud dapat dirumuskan sebagaimana tercantum dalam tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Blitar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
		Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah
			Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
			Optimalisasi pengelolaan parkir
			Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
			Penertiban pelanggaran lalu lintas
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja
			Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja tahun 2025 memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2025 serta menyebutkan program dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Blitar memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta formulasi perhitungan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilihat pada table II.2 berikut dan Lampiran 2 LKjIP Tahun 2025:

Tabel II.2

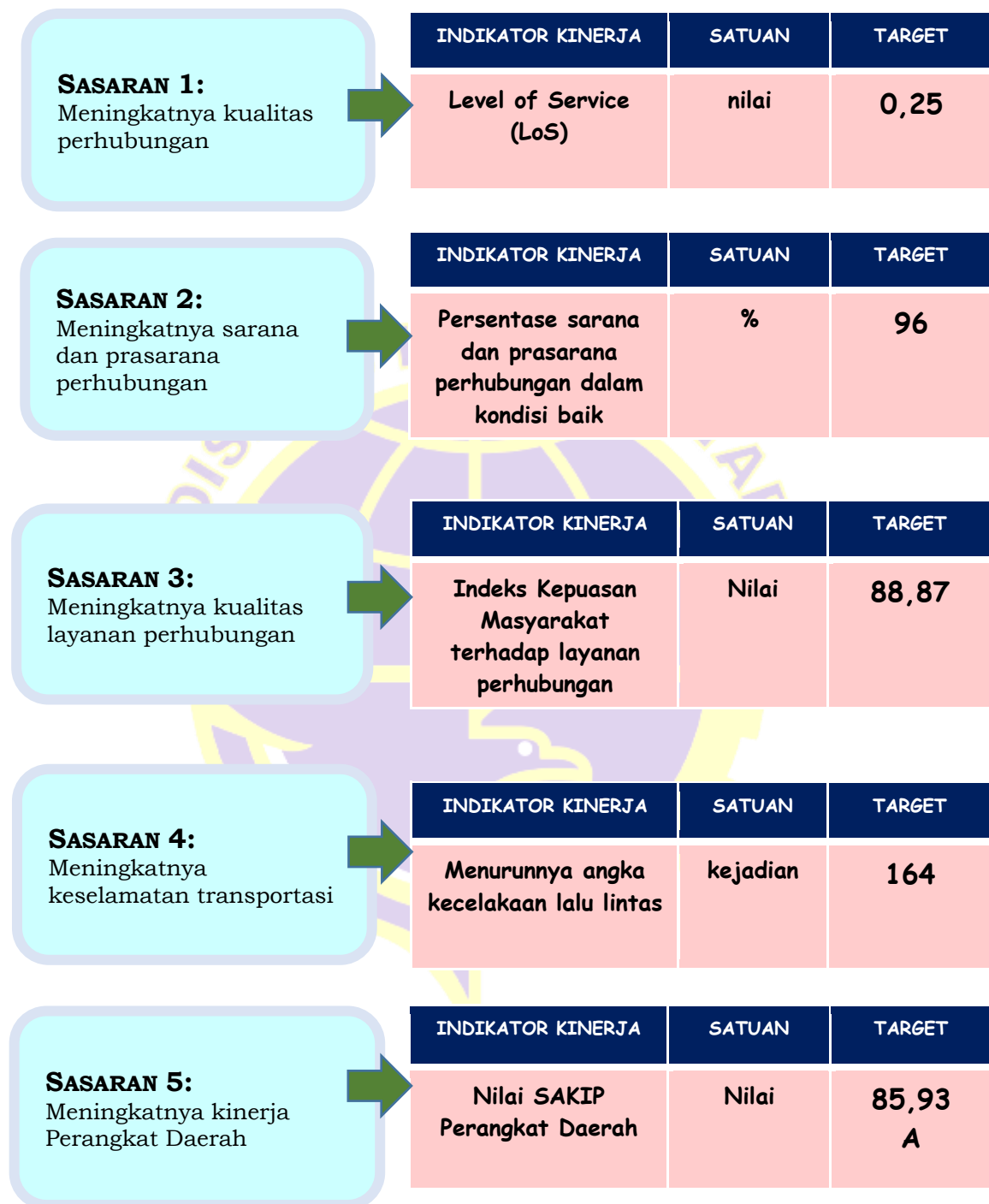
Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBAER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	V/C Ratio Kinerja Ruas Jalan pada tahun berjalan	Bidang Keselamatan Jalan, Bidang Lalu Lintas, UPT Pengelolaan Parkir	Kajian Kinerja Ruas Jalan
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal	Bidang Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal,	Data sarpras perhubungan dan fasilitas keselam

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBAER DATA
		baik	dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	Bidang Lalu Lintas dan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	atan
3.	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dan UPT Pengelolaan Parkir	Hasil penyusunan IKM layanan perhubungan
4.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	Bidang Lalu Lintas	Data angka kecelakaan lalu lintas
5.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Sekretariat	Hasil Penilaian SAKIP PD oleh Tim SAKIP Kota Blitar

Perjanjian Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 ada 3 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, dan 3). Perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III. Untuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota yang

selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran 3 LKj IP 2025.

C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP tahun 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagaimana tabel II.3 berikut:



Tabel II. 3
Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKj IP Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Terdapatnya beberapa ruas jalan yang belum dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan secara berkelanjutan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	√		Pada tahun 2025 telah dilakukan pengadaan dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas perhubungan yaitu berupa : • Pengadaan PJU sebanyak 60 unit • Pengadaan APILL (warning light) 1 unit • Pemeliharaan dan pembayaran rekening PJU sebanyak 5.866 unit • Pemeliharaan rambu, cermin tikungan, CCTV dan marka
2	Kurang optimanya sarpras terminal tipe c	Melaksanakan pembangunan/ pemeliharaan lanjutan fasilitas utama/ penunjang Terminal Tipe c	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) - Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	√		Sesuai Timeline untuk Jadwal pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dilaksanakan pada tahun 2026. Namun pada tahun 2025 juga telah dilaksanakan pemeliharaan fasilitas penunjang yaitu berupa pemeliharaan halte sebanyak 5 unit

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
3	Masih terdapatnya siswa yang belum bias menggunakan layanan angkutan sekolah dikarenakan rute angkutan yang kurang efisien	Penyusunan kajian trayek/ rute angkutan sekolah	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	√		Sesuai Timeline untuk Jadwal pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dilaksanakan pada tahun 2026. Namun pada tahun 2025 sudah dilaksanakan penyusunan kajian trayek/rute angkutan sekolah.
4	Kurang optimalnya layanan angkutan sekolah	Pengendalian dan pengawasan operasionalisasi angkutan sekolah	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	√		Pengendalian dan pengawasan operasionalisasi angkutan sekolah dilaksanakan secara rutin baik pada APBD 2025 maupun PAPBD 2025. Kegiatan ini meliputi pengawasan dan fasilitasi awak angkutan sebanyak 23 orang.
5	Masih terdapatnya juru parker yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi parkir	Penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	√		Penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian juru parkir dilaksanakan secara rutin baik pada APBD 2025 maupun PAPBD 2025.

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	tidak sesuai dengan SOP	juru parkir	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota			Kegiatan ini meliputi: - Monev parkir Bersama APH - Patroli penertiban parkir di seluruh lokasi parkir - Pembinaan juru parkir dengan mengundang narasumber yang berkompeten
6	Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas	Sosialisasi edukasi kelalulintasan kepada pengguna jalan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan sosialisasi kelalulintasan kepada peserta didik melalui program SIBINTANG dan kepada masyarakat pengguna jalan pada program CFD_GEMAS
7	Terdapatnya alat uji yang kurang laik sehingga mempengaruhi validitas hasil uji	Pemeliharaan alat uji kendaraan dan fasilitas pendukung lainnya	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pemeliharaan alat uji secara keseluruhan sebanyak 2 kali, pemeliharaan SIM PKB dan kalibrasi alat uji
8	Dokumen perencanaan kinerja telah	Mereviu dokumen perencanaan	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	√		Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah melakukan reviu terhadap

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	disusun, namun kinerja dan indicator kinerja sasaran dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART	perangkat daerah sesuai kriteria SMART	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu pada dokumen Renstra PD 2021-2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025
9	Ketercapaian pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dan penyesuaian anggaran maupun mempengaruhi pada penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Monev capaian kinerja seluruh pegawai secara berkala	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		Pad tahun 2025 telah dilaksanakan monev kinerja seluruh pegawai secara berkala yang berdampak pada penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pencapaian kinerja

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
10	Masih terdapatnya pegawai yang belum sepenuhnya memahami dan peduli atas penyajian informasi dalam laporan kinerja	Sosialisasi informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan sosialisasi informasi laporan kinerja melalui desk kepada masing-masing pegawai.
11	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah	Monev akuntabilitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan monev akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Adapun Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- Membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD.
- Membandingkan realisasi Kinerja Sasaran sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Sasaran

No.	% Nilai Capaian Kinerja		Predikat
	%	Keterangan	
1	85% s.d. 100%	Delapan Puluh Lima persen sampai dengan Seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh Puluh persen sampai dengan kurang dari Delapan Puluh Lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Liam Puluh Lima persen sampai dengan kurang dari Tujuh Puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Dibawah Lima Puluh Lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Analisis atas capaian kinerja pada tahun 2025 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Perhubungan guna mencapai target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagaimana ditunjukkan dalam table III.1 berikut.

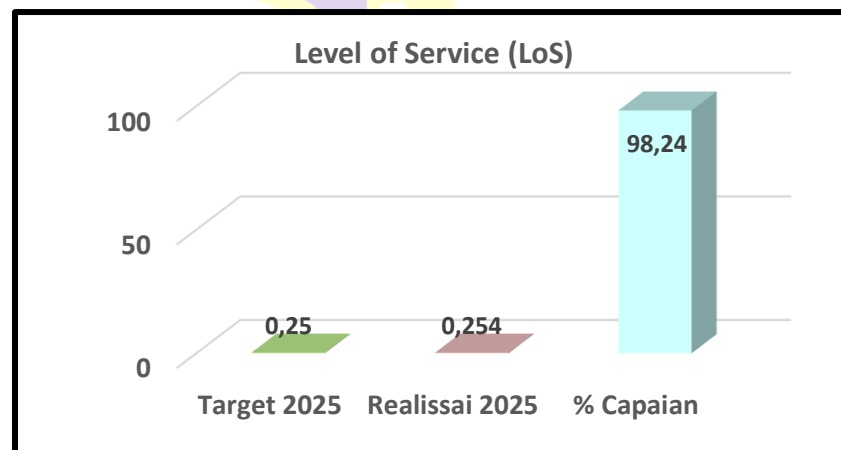
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	0,25	0,254	98,24
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	96	96	100
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	88,87	89,32	100,51
Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	164	111	132,32
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,93	A 86,35	100,49

Penjabaran analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 1** : Meningkatkan Kualitas Perhubungan, dengan indikator kinerja *Level of Service (LOS)* memperoleh capaian sebesar 98,24%

Diagram 1:
Meningkatnya kualitas perhubungan



1) Keterangan :

- ❖ Definisi Operasional indicator ini adalah: Level Of service (LOS) suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (v) dan kapasitas jalan (C). Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada volume tinggi, kecepatan akan menurun.
- ❖ Formulasi perhitungan untuk indikator sasaran *Level of Service (LoS)* adalah V/C Ratio Kinerja Ruas Jalan pada tahun berjalan
- ❖ Indikator tujuan Level of Service dengan target 0,25 terealisasi 0,254 dengan tingkat capaian 98,24%. Sehingga capaian indikator ini dikatakan belum memenuhi target. Penentuan predikat Level of Service diambil dari nilai rata-rata v/c rasio beberapa ruas jalan yang mewakili ruas jalan di Kota Blitar. Berikut tabel level of service yang digunakan sebagai rumusan dalam menentukan predikat/ tingkat layanan ruas jalan.

Tabel Level Of Service			
Tingkat Pelayanan	Karakteristik Lalu Lintas	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0 - 0,20	60
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,21 - 0,44	55
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45 - 0,74	50

Tabel Level Of Service			
Tingkat Pelayanan	Karakteristik Lalu Lintas	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan	0,75 - 0,84	40
E	Volume lalu lintas mendekati / berada pada kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti	0,85 - 1	30-35
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	> 1	<30

Adapun rekapitulasi hasil perhitungan/ kajian Level of Service di beberapa ruas jalan di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL KAJIAN KINERJA RUAS JALAN TAHUN 2025

NO	Kecamatan	Nama Jalan	Panjang (Km)	CO (Kapasitas Dasar)	Lebar Jalur (FCLJ)	Hambatan Samping (FCHS)	Ukuran Kota (FCUK)	Pemisahan Arah (FCPA)	Volume (Smp/ Jam)	Kapasitas Jalan (smp/ jam) C	V/C Ratio	LOS
1	SANANWETAN	Jl. A. Yani	1,48	2800	1,14	0,94	0,86	0,94	854,10	2425,588	0,3521	C
		Jl. Diponegoro	0,62	2800	0,87	0,92	0,86	0,94	663,3	1811,721	0,3661	C
		Jl. Merdeka	0,89	1700	1	0,94	0,86	1,00	475,92	1374,280	0,3463	C
		Jl. Merdeka Barat	0,20	2800	1	0,82	0,86	0,88	381,56	1737,613	0,2196	B
		Jl. Sultan Agung	0,77	2800	0,87	0,92	0,86	0,94	378,41	1811,721	0,2089	A
2	KEPANJENKIDUL	Jl. Mastrip	0,29	2800	1,25	0,95	0,86	1,00	433,49	2859,500	0,1516	A
3	SUKOREJO	Jl. Mawar	0,23	2800	1	0,91	0,86	0,88	381,56	1928,326	0,1979	A
		Jl. Jati	2,09	2800	0,87	0,94	0,86	0,94	413,55	1851,107	0,2234	B
		Jl. Widuri	2,09	2800	0,87	0,92	0,86	1,00	431,505	1927,363	0,2239	B
KINERJA RUAS JALAN (V/C RASIO) KOTA BLITAR TAHUN											0,2544	B

Dari tabel diatas rata-rata v/c ratio berada di angka 0,2544. Sehingga nilai ini dikategorikan pada tingkat pelayanan atau predikat B yang memiliki karakteristik arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan.

- ❖ Pada indikator kinerja *Level of Service (LoS)* terealisasi 0,254 dari target 0,25 dengan persentase capaian 98,24%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.
- ❖ Faktor pendorong : Kebijakan pimpinan dalam menjalankan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta implementasi penataan, pengendalian dan operasional di lapangan oleh SDM yang berkompeten.

2) Dari hasil Analisa kajian ruas jalan maka ada beberapa permasalahan utama yang terjadi pada beberapa ruas jalan diantaranya:

a) Jalan Widuri

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Dij antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.
- Hambatan samping: terminal barang, garasi bus "Permata Trans", garasi truk, pergudangan, SMP 6
- Terdapat terminal barang dan pergudangan sehingga arus lalu lintas banyak terdapat kendaraan sedang seperti truk dan bis
- Radius putar pada persimpangan masih dibawah $r = 4$ meter, masih dibawah standar radius putar kendaraan besar
- Masih terdapat blackspot yang dapat membahayakan pengguna jalan pada malam hari.

b) Jalan jati

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Dij

antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.

- Hambatan samping: sekolah MAN, PKL trotoar, Kantor Kecamatan, Apotek dan gudang, Toko Grosir
- Masih terdapat blackspot yang dapat membahayakan pengguna jalan pada malam hari.
- Merupakan jalan pendukung dari terminal barang di jalan Widuri, sehingga banyak melintas truk
- Radius putar pada persimpangan masih dibawah $r = 4$ meter, masih dibawah standar radius putar kendaraan besar

c) Jalan Mastrip

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Dj antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.
- Hambatan samping: perdagangan jasa, parkir on street, stasiun
- Merupakan jalan pendukung aktivitas pada jalan Merdeka

d) Jalan Mawar

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Dj antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.
- Hambatan samping: pasar legi, rel KA, sekolah, parkir on street dan PK5
- Aktivitas PK5 dan parkir memakan hampir 5 meter badan jalan
- Terdapat pelanggaran rambu atau mengacuhkan rambu sehingga membahayakan pengguna jalan

e) Jalan Merdeka Barat

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Dj antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan

masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.

- Hambatan samping: parkir on street, pelanggaran parkir, Hotel My Home, perdagangan jasa
- Parkir kendaraan pada sisi selatan jalan terlalu dekat dengan perempatan Merdeka, sehingga menyebabkan bottle neck menuju jalan merdeka Barat
- Pelanggaran parkir pada sisi utara jalan mempersempit kapasitas jalan

f) Jalan Merdeka

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Di antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.
- Jalan Merdeka siap menjadi jalan pelayanan kegiatan Kota Blitar, dengan Derajat kejenuhan yang rendah dan kapasitas jalan lebar serta terdapat jalan Mastrip yang bisa mendukung/jalan alternatif apabila tingkat aktivitas jalan merdeka tinggi
- Hambatan samping: parkir on street, perjas, alun-alun, perkantoran, Hotel Tugu
- Kecepatan tempuh yang tinggi dan kapasitas jalan yang lebar dapat membahayakan penyeberang jalan. Disamping itu kawasan ini terdapat lokasi-lokasi aktivitas tinggi seperti alun-alun, pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel/penginapan

g) Jalan A. Yani

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Di antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.
- Hambatan samping: rel KA, sekolah taman siswa, RM Padang, Hi Mart, angkringan dan cafe
- Blackspot di depan SMAN 1 karena tajuk tumbuhan menutupi PJU membahayakan pengguna jalan

h) Jalan Diponegoro

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Dj antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.
- Hambatan samping: taman kebonrojo, parkir on street, SPBU, sekolah SMK 3, PKL
- Terdapat aktivitas kebonrojo mengakibatkan PK5 semakin menjorok ke arah badan jalan
- Tingginya minat pengunjung taman Kebonrojo dengan kendaraan besar sebagai moda transportasi menjadikan hambatan samping semakin besar
- Sekolah pada kawasan ini belum memiliki zonaselamat sekolah (ZOSS)

i) Jalan Sultan Agung

- Level of Service jalan pada kelas B (Arus Stabil): Dj antara 0,20-0,44, arus lalu lintas stabil, kecepatan masih cukup tinggi, dan kepadatan mulai meningkat.
- Hambatan samping: MI Perwanida, istana gebang, cafe dan perdagangan jasa
- Derajat jenuh lebih rendah dari Jalan Diponegoro (Dj:0,76) tetapi kecepatan tempuh juga lebih rendah (23km/jam) menandakan hambatan samping sangat besar terutama karena aktivitas sekolah MI Perwanida.
- Terdapat aktivitas café Tanpa parkir off street
- Blackspot di depan istana gebang dan Sekolah PERWANIDA

3) Dari beberapa permasalahan utama diatas maka berdasarkan hasil analisa kajian kinerja ruas jalan disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a) Jalan Widuri

- Penambahan radius putar pada ujung simpang yang semula antara $r=3-4m$ menjadi $r=6m$ sebagai ruang

gerak truk.

- Mewajibkan pergudangan & garasi untuk menambahkan lampu hati- hati (warning light)
- Rabas-rabas tajuk pohon yang menghalangi cahaya PJU untuk menghilangkan blackspot.

b) Jalan jati

- Penambahan radius putar ($r=3-4m$ menjadi $r=6m$)
- Penambahan rambu kecepatan maksimal 30km/jam
- ZOSS & Lampu penyeberangan Lokasi: Sekolah MAN & Kantor Kecamatan
- Rabas-rabas tajuk pohon yang menghalangi cahaya PJU untuk menghilangkan blackspot

c) Jalan Mastrip

- Sebagai jalan pendukung dari aktivitas jalan Merdeka yang menjadi jalan pusat pelayanan Kota Blitar

d) Jalan Mawar

- Memindah aktivitas PK5 dari badan jalan sisi selatan ke dalam halaman pasar Legi → Food Court (skenario 1)
- Menutup jalan Mawar sepanjang depan pasar Legi. Mengalihkan arus lalu lintas memutar pasar Legi. → Food Court “Kya-Kya” (scenario 2)
- ZOSS & Lampu penyeberangan Lokasi : SDN Sukorejo III Sukorejo

e) Jalan Merdeka Barat

- Penegasan pelarangan parkir (Tilang, penguncian ban, derek) sisi utara Jl. merdeka barat
- Skenario 1: Mengingat pemisah arah waktu libur 70%-30% dan waktu kerja 60%-40%, Ruas sisi selatan dapat lebih di pelebar
- Skenario 2 : Parkir kendaraan sisi selatan digeser 100 meter ke barat untuk menghindari bottle neck dari arus lalu lintas dari jalan Merdeka dan jalan Anggrek

- Belok kiri jalan terus dari jalan Merdeka Barat ke jalan Wilis (ke utara)

f) Jalan Merdeka

- Dari hasil analisa, Jalan Merdeka siap menjadi jalan pelayanan kegiatan Kota Blitar, dengan Derajat kejenuhan yang rendah dan kapasitas jalan lebar serta terdapat jalan Mastrip yang bisa mendukung/jalan alternatif apabila tingkat aktivitas jalan merdeka tinggi

g) Jalan A. Yani

- Rabas-rabas di Jl. A.Yani untuk menghilangkan blackspot
- Mewajibkan fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintah untuk menambah penerangan jalan
- Perbaiki ZOSS dan penambahan lampu penyeberangan pada SMAN1 Blitar
- Pengendalian ijin penggunaan dan pemanfaatan ruang aktivitas dengan hambatan samping tinggi harus dilengkapi parkir, seperti: pusat perbelanjaan, cafe, sekolah, hotel
- Persyaratan ANDALALIN untuk perijinan aktifitas usaha
- Tidak menjadikan jalan ini sebagai jalan alternatif (apabila ada pengalihan arus lalu lintas)

h) Jalan Diponegoro

- Parkir Drop Off untuk pengunjung taman Kebonrojo dengan bis dan kendaraan besar-sedang lainnya. Parkir kendaraan besar-sedang pada lokasi Museum Peta
- Pengendalian PK5 agar tidak menggunakan badan jalan dan sempadan jalan
- Pengendalian ijin penggunaan dan pemanfaatan ruang aktivitas dengan hambatan samping tinggi harus dilengkapi parkir, seperti cafe, sekolah, penginapan
- Persyaratan ANDALALIN untuk perijinan aktifitas usaha

- Tidak menjadikan jalan ini sebagai jalan alternatif (apabila ada pengalihan arus lalu lintas)
- i) Jalan Sultan Agung
- Rabas-rabas tajuk pohon yang menghalangi cahaya PJU untuk menghilangkan blackspot
 - Mewajibkan fasilitas umum seperti sekolah MI Perwanida, Istana Gebang untuk menambah penerangan jalan
 - Pengendalian izin penggunaan dan pemanfaatan ruang aktivitas dengan hambatan samping tinggi harus dilengkapi parkir, seperti: pusat perbelanjaan, cafe, sekolah, penginapan
 - Persyaratan ANDALALIN untuk perijinan aktifitas usaha
 - Tidak menjadikan jalan ini sebagai jalan alternatif (apabila ada pengalihan arus lalu lintas)
 - Penambahan ZOSS dan penambahan lampu penyeberangan pada MI Perwanida
 - Skenario pemecahan kemacetan dari aktivitas sekolah MI Perwanida: Skenario 1 adalah Pengantar sekolah diwajibkan datang dari barat, Skenario 2 adalah Jalan searah ke arah timur berdasar jam padat 06.00-07.00 dan 13.00- 14.00

Berdasarkan data analisa bahwa pelaksanaan rekomendasi tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan saja melainkan terdapat peran dari perangkat daerah lainnya yang harus dikoordinasikan. Berikut table rekomendasi kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan perangkat daerah.

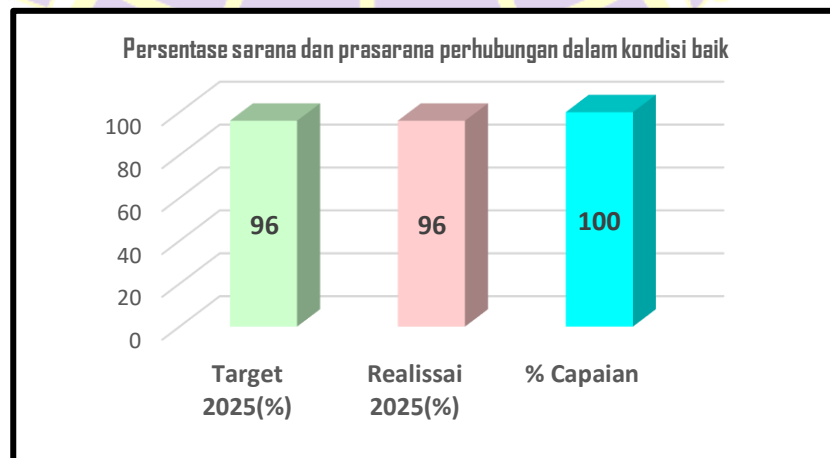
No	Kegiatan	Qtt.	Lokasi	OPD
1	Kajian pelebaran radius putar simpang Jl. Widuri & Jati	3 simpang	Jl. Widuri, Jl.Jati	Dishub

No	Kegiatan	Qtt.	Lokasi	OPD
2	Pengadaan lahan dalam rangka pelebaran radius putar simpang Jl. Widuri & Jati	3 simpang	Jl. Widuri, Jl.Jati	Dishub
3	Pelebaran radius putar pada simpang Jl. Widuri & Jati	3 simpang	Jl. Widuri, Jl.Jati	Dishub PUPR
4	Pengendalian ijin penggunaan dan pemanfaatan ruang	Ls	Jl. A.Yani, Jl. Widuri, Jl. Sultan Agung, Jl. Jati	PUPR Bapperinda
5	Penegasan persyaratan ANDALALIN untuk kegiatan berusaha	Ls	Jl. A.Yani, Jl. Widuri, Jl. Sultan Agung	DPMPSTSP
7	Kajian penataan PK5 di Jl. Mawar	1 kajian	Jl. Mawar	Disperindag
8	Penertiban PK5	Ls	Jl. Mawar Jl. Diponegoro (taman kebonrojo)	Satpol PP
9	pengawasan dan penertiban parkir	Ls	Jl. Merdeka Jl. Merdeka Barat Jl. Mawar	Dishub
10	pengadaan alat pengawasan dan penertiban parkir liar	Ls		Dishub
	Pengadaan lampu hati-hati (warning light)	Ls	Jl. Jati Jl. Widuri	
11	Pengadaan Lampu Penyeberangan Pejalan Kaki (pelican crossing)	1 unit	Jl. Jati	Dishub
		1 unit	Jl.Mawar	
		3 unit	Jl.Merdeka	
		1 unit	Jl.Ahmat Yani	
		1 unit	Jl.Sultan Agung	
		1 unit	Jl.Diponegoro	
12	Pengadaan Zona Aman Sekolah (ZOSS)	1 unit	Jl. Jati	Dishub
		1 unit	Jl.Mawar	
		1 unit	Jl.Ahmat Yani	
		1 unit	Jl.Sultan Agung	
		1 unit	Jl.Diponegoro	

No	Kegiatan	Qtt.	Lokasi	OPD
13	Rabas-rabas pohon dalam rangka perawatan PJU	Ls	Jl. Jati Jl. Widuri, Jl. A.Yani, Jl. Sultan Agung,	DLH
14	Pengadaan Rambu Dilarang Parkir	1 unit	Jl. Merdeka Barat	Dishub
15	Pengadaan rambu maksimal kecepatan 30km/jam	2 unit	Jl. Jati	Dishub
		2 unit	Jl. Merdeka	

- b. Sasaran 2 :** Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, dengan indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* memperoleh capaian sebesar 100%.

Diagram 2:
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan



1) Keterangan :

- ❖ Jumlah Perlengkapan jalan dalam kondisi baik sejumlah 129.049 dari total keseluruhan 133.530. Jumlah prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sejumlah 93 dari total keseluruhan 94. Jumlah fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik sejumlah 2.744 dari total keseluruhan 2.928. Sedangkan jumlah sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sejumlah 18 dari total keseluruhan 19.
- ❖ Formulasi perhitungan indikator sasaran *Persentase sarana*

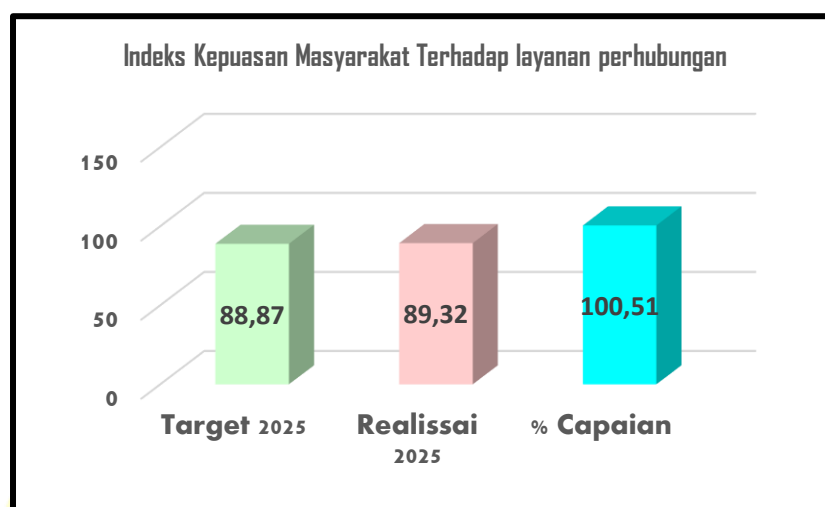
dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik adalah rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik. Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik sebesar 96,64%, persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sebesar 98,94%, persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik sebesar 93,68% dan persentase sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sebesar 94,74%.

- ❖ Pada indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* terealisasi 96% dari target 96% dengan persentase capaian 100%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.
 - ❖ Faktor pendorong: Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan program prioritas urusan perhubungan.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu masih terdapatnya beberapa ruas jalan yang belum dilengkapi perlengkapan jalan sesuai standar, belum tersedianya data kebutuhan perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan serta kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga asset bersama (APILL, perambuan dan fasilitas keselamatan lainnya) sehingga masih terdapat kerusakan di beberapa ruas jalan serta terjadinya vandalisme/pencurian.
 - 3) Solusi yang ditempuh yaitu mengalokasikan anggaran untuk kajian data kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kondisi ideal dan penyediaan maupun pemeliharaan perlengkapan jalan secara berkala.

c. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan

perhubungan, memperoleh capaian sebesar 100,51%

Diagram 3:
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan



1) Keterangan :

- ❖ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan angkutan sekolah gratis sebesar 89,96. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan uji kendaraan bermotor sebesar 92,59 sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar 85,41.
- ❖ Formulasi perhitungan untuk indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan* adalah rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM layanan uji kendaraan bermotor dan IKM pelayanan parkir tepi jalan umum
- ❖ Pada indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan* tercapai 89,32% dari target 88,87% dengan persentase capaian sebesar 100,51%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.
- ❖ Faktor pendorong : Komitmen Tata cara pelayanan yang dibakukan mudah, kesesuaian biaya dengan peraturan dan

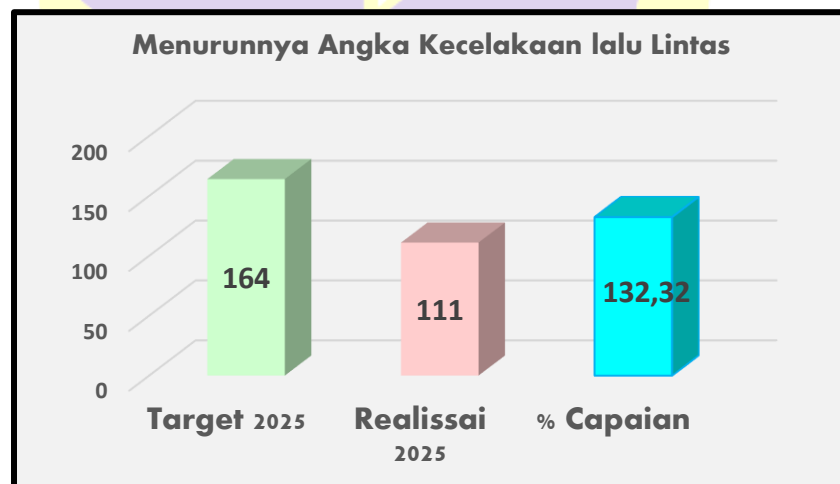
transparansinya, pengelolaan tindak lanjut keluhan/ aduan berjalan optimal.

- ❖ Kendala mendasar yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah Kecepatan jangka waktu pelayanan kurang optimal, sarpras/fasilitas pendukung pelayanan kurang memadai dan kurangnya kompetensi/kemampuan petugas pemberi layanan.
- ❖ Tindak lanjut atas kondisi tersebut yaitu dengan melakukan reviu terhadap SOP yang sudah ada, pemeliharaan sarana prasarana layanan dan pelaksanaan kalibrasi secara berkala serta memberikan pelatihan khusus atau pembinaan terkait excellent.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya keselamatan transportasi, dengan indikator kinerja *menurunnya angka kecelakaan lalu lintas* memperoleh capaian sebesar 132,32%.

Diagram 4:

Meningkatnya Keselamatan Transportasi



1) Keterangan :

- ❖ Pada indikator sasaran menurunnya angka kecelakaan lalu lintas tercapai 111 kejadian dari target 164 kejadian dengan persentase capaian sebesar 132,32%. Sehingga indikator

ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

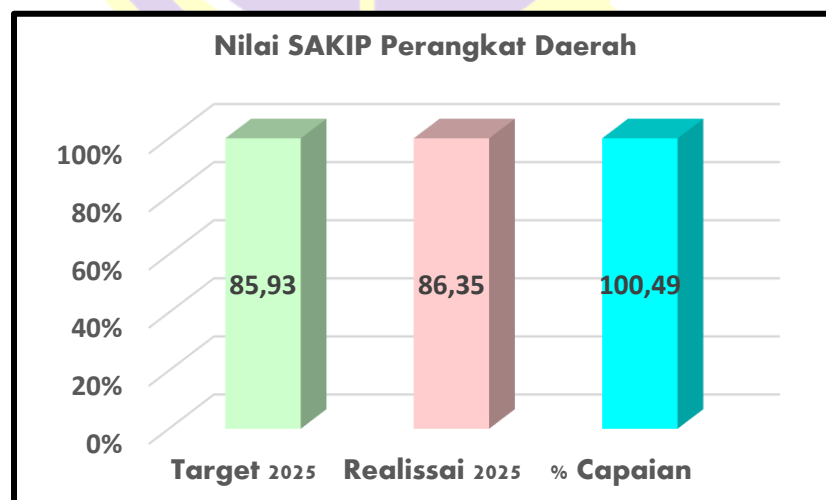
- ❖ Faktor pendorong : Kebijakan pimpinan terkait pengendalian angka kecelakaan lalu lintas di Kota Blitar dalam mengimplementasikan manajemen rekayasa lalu lintas

- 2) Kendala/ faktor penghambat yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar selain itu juga masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan akan lalu lintas berkeselamatan.
- 3) Solusi/Rencana Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah pengalokasian anggaran rangka pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan seperti rambu, APILL dan fasilitas keselamatan lainnya serta sosialisasi kelalulintasan kepada masyarakat pengguna jalan secara bertahap sesuai pemetaan kebutuhan.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* memperoleh capaian sebesar 100,00%

Diagram 5:

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah



- 1) Keterangan :

- ❖ Pada indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 86,35 dari target 85,93 dengan persentase capaian sebesar 100,49%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.
 - ❖ Faktor pendorong: Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, dokumen laporan kinerja telah tersusun tepat waktu dan menggambarkan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
- 2) Kendala/ faktor penghambat yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu kurangnya optimalisasi pencapaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 3) Solusi/Rencana Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:
- ❖ Melakukan upaya peningkatan capaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadinya peningkatan capaian kinerja
 - ❖ Menyusun perubahan rencana aksi kinerja tahun 2025

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel III.2 berikut :

Tabel III.2
Pencapaian Target pada Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	98,24%	V			
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	100%	V			

Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	100,51%	V			
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	132,32%	V			
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,49%	V			
Rata-rata keberhasilan capaian Sasaran Strategis		106,31	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja sasaran tersebut, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2025 termasuk kategori Sangat Berhasil, dengan nilai capaian kinerja 106,31%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

Perbandingan data kinerja terhadap realisasi kinerja tahun 2023, 2024 dan 2025 untuk setiap indikatornya diuraikan pada tabel III.3 berikut:

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2023- 2025

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			% Capaian Kinerja		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas perhubungan	Level of Service (LoS)	C 0,465	B 0,259	B 0,25	B 0,259	B 0,283	B 0,254	144,30 %	90,94 %	98,24 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	94 %	95,75 %	96 %	95,75 %	95,32 %	96 %	101,86 %	99,55 %	100 %
3	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,12	84,98	88,87	84,98	88,87	89,32	104,76 %	104,58 %	100,51 %
4	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	-	440	164	-	164	111	-	157,95 %	132,32 %
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,05	85,93	85,93	84,07	85,93	86,35	98,85 %	100 %	100,49 %

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2023-2025 diatas dapat disimpulkan bahwa:

- ❖ Persentase Capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kualitas perhubungan* dengan indikator kinerja Level of Service (LoS) dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 144,30% sedangkan pada tahun 2024 mencapai 90,94% dan tahun 2025 mencapai 98,24%. Adapun faktor penyebab turunnya realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah kurang optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (perambuan) di beberapa ruas jalan sedangkan faktor pendukung naiknya realisasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 adalah kebijakan pimpinan dalam menjalankan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta implementasi penataan, pengendalian dan operasional di lapangan oleh SDM yang berkompeten.
- ❖ Persentase Capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan* dengan indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 101,86% sedangkan pada tahun 2024 mencapai 99,55% dan pada tahun 2025 mencapai 100%. Adapun faktor penyebab turunnya realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik sesuai standar kebutuhan sedangkan faktor pendukung naiknya realisasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 adalah penyediaan sarana dan prasarana perhubungan merupakan program prioritas urusan perhubungan.
- ❖ Persentase capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya*

kualitas layanan perhubungan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan dari tahun 2024 ke tahun 2025 berturut turut mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 104,76% pada tahun 2024 mencapai 104,58 dan pada tahun 2025 mencapai 100,51%. Adapun faktor pendukung naiknya realisasi secara periodik mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah SDM yang berkompeten dalam pemberian layanan, komitmen tata cara pelayanan yang dibakukan mudah, kesesuaian biaya dengan peraturan dan transparansinya, pengelolaan tindak lanjut keluhan/ aduan berjalan optimal.

- ❖ Persentase capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya keselamatan transportasi* dengan indikator kinerja Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 belum dilakukan penghitungan dan pada tahun 2024 ke tahun 2025 persentase capaian kinerja mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2024 mencapai 157,95% sedangkan pada tahun 2025 mencapai 132,32%. Adapun faktor pendukung naiknya realisasi dari tahun 2024 ke tahun 2025 adalah kebijakan pimpinan terkait pengendalian angka kecelakaan lalu lintas di Kota Blitar dalam mengimplementasikan manajemen rekayasa lalu lintas dan penggalakan sosialisasi kelalulintasan kepada masyarakat pengguna jalan dan edukasi kelalulintasan kepada peserta didik.
- ❖ Persentase capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kinerja perangkat daerah* dengan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 berturut turut mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 98,85% pada tahun 2024 sebesar 100% sedangkan pada tahun 2025 mencapai 100,49%. Adapun faktor pendukung naiknya realisasi secara periodik mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 adalah dokumen perencanaan kinerja

telah tersedia, dokumen laporan kinerja telah tersusun tepat waktu dan menggambarkan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 sampai dengan periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel III.4 berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2021-2026
Dinas Perhubungan Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	B 0,430	B 0,254	140,84%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	97 %	96%	98,97 %
3	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,18 Baik	89,32 Sangat Baik	110,03 %
4	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	366 kejadian	111 kejadian	169,67%
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,30 A	86,35 A	101,23%

Berdasarkan tabel diatas ada 4 (empat) indikator kinerja yang

capaian realisasi tahun 2025 sudah melebihi target akhir Renstra dan 1 (satu) indikator kinerja yang capaian realisasinya tahun 2025 belum mencapaia target akhir Renstra. Untuk indikator yang sudah mencapaia target Renstra, yaitu:

- ❖ Level of Service (LOS)
- ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan.
- ❖ Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
- ❖ Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan indikator yang belum mencapai target akhir Renstra adalah *persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik*. Untuk menyikapi hal tersebut, maka indikator ini akan masuk prioritas pada perencanaan jangka menengah berikutnya.

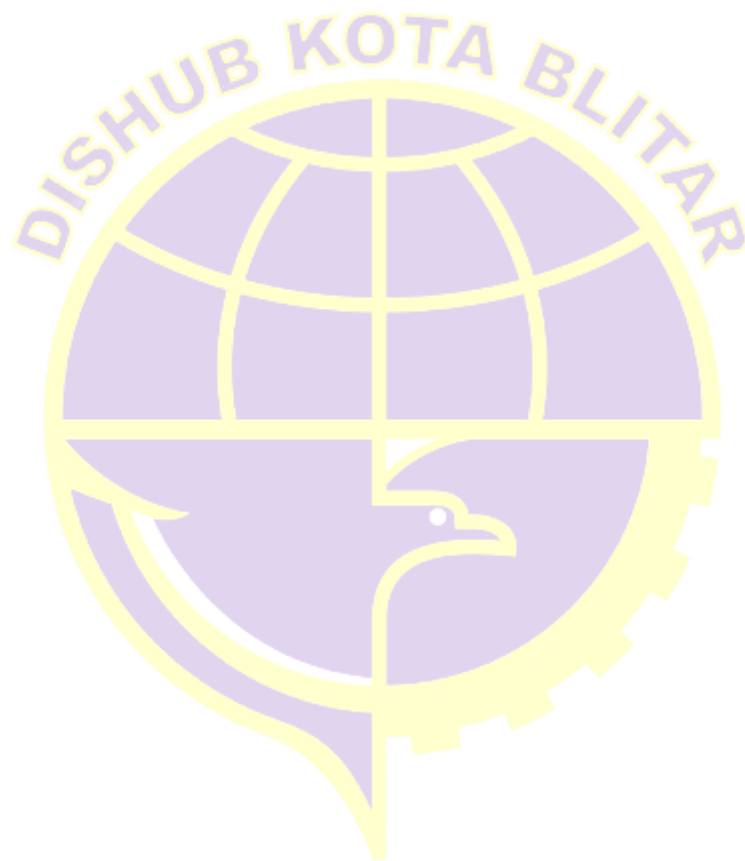
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal, bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan
6. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka pada tahun 2025 Dinas Perhubungan tidak berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun Dinas Perhubungan Kota Blitar tetap melakukan evaluasi

perbandingan terhadap realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Lainnya.



Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota Lain
Tahun 2025

Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
		Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LoS)	0,359	0,25	0,59	0,254	35,65%	98,24%
Meningkatnya Kinerja Transportasi	- Persentase Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan prasarana perhubungan layak fungsi (Kabupaten Tulungagung) - Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Kota Blitar)	90%	96 %	91,38%	96 %	101,53	100 %

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tabel III.6 berikut akan kami sajikan pagu anggaran, realisasi anggaran dan sisa pagu anggaran beserta persentase realisasinya.

Tabel III.6
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.340.15 0.024,59	6.863.18 9.607,00	93,50 %	476.960. 418	6,50%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.0 00,00	11.920.0 00,00	99,33 %	80.000	0,67%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.800.00 0	8.720.00 0,00	99,09 %	80.000	0,91%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.200.00 0	3.200.00 0,00	100,00 %	0	0,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.621.03 7.560,59	5.239.55 9.907,00	93,21 %	381.477. 654	6,79%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.619.45 3.160,59	5.237.99 1.311,00	93,21 %	381.461. 850	6,79%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	1.584.400,00	1.568.596,00	99,00 %	15.804	1,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.129.900,00	245.400.230,00	96,95 %	7.729.670	3,05%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.678.600,00	116.172.780,00	99,57 %	505.820	0,43%
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	136.451.300,00	129.227.450,00	94,71 %	7.223.850	5,29%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.911.100,00	228.835.173,00	93,82 %	15.075.927	6,18%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.760.100,00	9.623.079,00	98,60 %	137.021	1,40%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.785.000,00	17.730.817,00	99,70 %	54.183	0,30%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.668.000,00	13.442.381,00	98,35 %	225.619	1,65%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.252.000,00	44.526.700,00	76,44 %	13.725.300	23,56 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.098.00 0,00	8.998.71 5,00	98,91 %	99.285	1,09%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	7.800.00 0,00	7.536.00 0,00	96,62 %	264.000	3,38%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.498. 000,00	101.229. 881,00	99,74 %	268.119	0,26%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.050.0 00,00	25.747.6 00,00	98,84 %	302.400	1,16%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.367.2 00,00	54.082.3 00,00	92,66 %	4.284.90 0	7,34%
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	11.606.2 00,00	11.575.1 00,00	99,73 %	31.100	0,27%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.761.0 00,00	42.507.2 00,00	90,90 %	4.253.80 0	9,10%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.058. 104,00	642.961. 463,00	93,86 %	42.096.6 41	6,14%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.609. 000,00	189.883. 341,00	85,30 %	32.725.6 59	14,70 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	462.449. 104,00	453.078. 122,00	97,97 %	9.370.98 2	2,03%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.646. 160,00	440.430. 534,00	94,38 %	26.215.6 26	5,62%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	378.833. 160,00	354.521. 476,00	93,58 %	24.311.6 84	6,42%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.335.0 00,00	33.117.0 58,00	99,35 %	217.942	0,65%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.428.0 00,00	43.710.0 00,00	98,38 %	718.000	1,62%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.050.0 00,00	9.082.00 0,00	90,37 %	968.000	9,63%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.568.03 1.232,61	6.058.07 5.925,00	92,24 %	509.955. 308	7,76%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.568.03 1.232,61	6.058.07 5.925,00	92,24 %	509.955. 308	7,76%
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	306.774. 784,00	268.990. 179,00	87,68 %	37.784.6 05	12,32 %
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	52.005.6 90,00	43.429.6 75,00	83,51 %	8.576.01 5	16,49 %
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5.691.79 7.658,61	5.253.37 8.244,00	92,30 %	438.419. 415	7,70%
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	517.453. 100,00	492.277. 827,00	95,13 %	25.175.2 73	4,87%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	25.076.6 00,00	24.754.1 59,00	98,71 %	322.441	1,29%
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	25.076.6 00,00	24.754.1 59,00	98,71 %	322.441	1,29%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	25.076.6 00,00	24.754.1 59,00	98,71 %	322.441	1,29%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.429.15 9.954,80	1.175.76 3.029,00	82,27 %	253.396. 926	17,73 %

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.429.15 9.954,80	1.175.76 3.029,00	82,27 %	253.396. 926	17,73 %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.429.15 9.954,80	1.175.76 3.029,00	82,27 %	253.396. 926	17,73 %
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	176.375. 318,00	172.938. 928,00	98,05 %	3.436.39 0	1,95%
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	176.375. 318,00	172.938. 928,00	98,05 %	3.436.39 0	1,95%
Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	29.048.6 00,00	28.601.4 88,00	98,46 %	447.112	1,54%
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.0 00,00	25.000.0 00,00	100,00 %	0	0,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	122.326. 718,00	119.337. 440,00	97,56 %	2.989.27 8	2,44%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	1.733.55 8.156,00	1.709.56 5.845,00	98,62 %	23.992.3 11	1,38%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Angkutan Jalan (LLAJ)					
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.733.55 8.156,00	1.709.56 5.845,00	98,62 %	23.992.3 11	1,38%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1.068.69 0.756,00	1.061.33 6.779,00	99,31 %	7.353.97 7	0,69%
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	664.867. 400,00	648.229. 066,00	97,50 %	16.638.3 34	2,50%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.567.31 5.342,00	2.500.37 6.801,00	97,39 %	66.938.5 41	2,61%
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2.567.31 5.342,00	2.500.37 6.801,00	97,39 %	66.938.5 41	2,61%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.009.33 5.442,00	1.985.60 3.408,00	98,82 %	23.732.0 34	1,18%
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	257.050. 500,00	223.332. 295,00	86,88 %	33.718.2 05	13,12 %
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	208.968. 000,00	207.207. 026,00	99,16 %	1.760.97 4	0,84%
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	91.961.4 00,00	84.234.0 72,00	91,60 %	7.727.32 8	8,40%
	19.839.6 66.628,0 0	18.504.6 64.294,0 0	93,27 %	1.335.00 2.334	6,73%

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada Sasaran Strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.7
Alokasi per Sasaran Pembangunan
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	12.499.516.603,41	63%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	6.593.107.832,61	33,23%
3	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	3.339.093.428,80	16,83%
4	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	2.567.315.342,00	12,94%
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.340.150.024,59	37%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel III.8 berikut :

Tabel III.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	nilai	0,25	0,2544	98,24	12.499.516.603,41	11.641.474.687,00	93,14
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	<i>99,60</i>	<i>96,58</i>	<i>96,97</i>	<i>6.568.031.232,61</i>	<i>6.058.075.925,00</i>	<i>92,24</i>
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	<i>96,98</i>	<i>98,94</i>	<i>102,02</i>	<i>25.076.600,00</i>	<i>24.754.159,00</i>	<i>98,71</i>
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum</i>	<i>indeks</i>	<i>83,49</i>	<i>85,41</i>	<i>102,30</i>	<i>1.429.159.954,80</i>	<i>1.175.763.029,00</i>	<i>82,27</i>
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor</i>	<i>indeks</i>	<i>92,20</i>	<i>92,59</i>	<i>100,42</i>	<i>176.375.318,00</i>	<i>172.938.928,00</i>	<i>98,05</i>

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	indeks	90,92	89,96	98,94	1.733.558.156,00	1.709.565.845,00	98,62
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%	0,30	0,59	196,67	2.567.315.342,00	2.500.376.801,00	97,39
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					98,24	12.499.516.603,41	11.641.474.687,00	93,14
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	96	96	100	6.593.107.832,61	6.082.830.084,00	92,26
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%	99,60	96,58	96,97	6.568.031.232,61	6.058.075.925,00	92,24
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	jenis	3	3	100	6.568.031.232,61	6.058.075.925,00	92,24

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%	96,98	98,94	102,02	25.076.600,00	24.754.159,00	98,71
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	jenis	16	16	100	25.076.600,00	24.754.159,00	98,71
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					100	6.593.107.832,61	6.082.830.084,00	92,26
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	indeks	88,87	89,32	100,51	3.339.093.428,80	3.058.267.802,00	91,59
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Indeks	90,92	89,96	98,94	1.733.558.156,00	1.709.565.845,00	98,62
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	%	88,89	100	112,50	1.733.558.156,00	1.709.565.845,00	98,62

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	92,20	92,59	100,42	176.375.318,00	172.938.928,00	98,05
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	%	96,68	98,97	102,37	176.375.318,00	172.938.928,00	98,05
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Indeks	83,49	85,41	102,30	1.429.159.954,80	1.175.763.029,00	82,27
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	%	80,77	82,89	102,62	1.429.159.954,80	1.175.763.029,00	82,27
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					100,51	3.339.093.428,80	3.058.267.802,00	91,59
Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	kejadian	164	111	132,32	2.567.315.342,00	2.500.376.801,00	97,39
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%	0,30	0,59	196,67	2.567.315.342,00	2.500.376.801,00	97,39

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	2	2	100,00	2.567.315.342,00	2.500.376.801,00	97,39
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					132,32	2.567.315.342,00	2.500.376.801,00	97,39
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85,93	86,35	100,49	7.340.150.024,59	6.863.189.607,00	93,50
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<i>indeks</i>	<i>87,77</i>	<i>95,35</i>	<i>108,64</i>	<i>7.340.150.024,59</i>	<i>6.863.189.607,00</i>	<i>93,50</i>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	12.000.000,00	11.920.000,00	99,33

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	5.621.037.560,59	5.239.559.907,00	93,21
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	253.129.900,00	245.400.230,00	96,95
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	243.911.100,00	228.835.173,00	93,82
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100,00	100,00	100,00	58.367.200,00	54.082.300,00	92,66
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	685.058.104,00	642.961.463,00	93,86

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	466.646.160,00	440.430.534,00	94,38
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					100,49	7.340.150.024,59	6.863.189.607,00	93,50

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 adalah:

- ❖ Sasaran 1: “Meningkatnya kualitas perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 98,24% dengan persentase capaian anggaran sebesar 93,14%;
- ❖ Sasaran 2: “Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 100% dengan persentase capaian anggaran sebesar 92,26%;
- ❖ Sasaran 3: “Meningkatnya kualitas layanan perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 100,51% dengan persentase capaian anggaran sebesar 91,59%;
- ❖ Sasaran 4: “Meningkatnya keselamatan transportasi” persentase capaian kinerjanya mencapai 132,32% dengan persentase capaian anggaran sebesar 97,39%;
- ❖ Sasaran 5: “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” persentase capaian kinerjanya mencapai 100% dengan persentase capaian anggaran sebesar 93,50%.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 ditunjukkan pada tabel III.9 berikut :

Tabel III.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	98,24	93,14	1,05
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik</i>	<i>96,97</i>	<i>92,24</i>	<i>1,05</i>

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	102,02	98,71	1,03
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	102,30	82,27	1,24
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	100,42	98,05	1,02
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	98,94	98,62	1
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	196,67	97,39	2,01
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		98,24	93,14	1,05
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,49	93,50	1,07
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	108,64	93,50	1,16
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		100,49	93,50	1,07

Dari tabel diatas, untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat disimpulkan bahwa :

- ❖ Sasaran 1: Meningkatkan kualitas perhubungan, tingkat efisiensinya sebesar 1,05. Hal ini dapat dikatakan efisiensi

karena untuk mencapai kinerja sebesar 98,24% hanya membutuhkan anggaran sebesar 93,14%.

- ❖ Sasaran 2: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, tingkat efisiensinya sebesar 1,07. Hal ini dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja 100,49% membutuhkan anggaran sebesar 93,50%.
- ❖ Dari sasaran kinerja Perangkat Daerah diatas semua mencapai efisiensi, hal ini disebabkan beberapa faktor pendorong yaitu selain tercukupinya SDM yang berkompeten juga karena strategi dan kebijakan pimpinan mulai proses perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala guna optimalisasi capaian kinerja organisasi.

C. Prestasi / Penghargaan

-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Dinas Perhubungan kota Blitar tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Blitar. Dari hasil capaian Indikator Kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa:

Sasaran 1, Meningkatnya kualitas perhubungan dengan indikator sasaran *Level Of Service (LOS)*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2025 mencapai 0,2544 dari target 0,25 dengan capain 98,24%, sehingga pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Sasaran 2, Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator sasaran *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2025 mencapai 96% dari target 96% dengan capain 100%, sehingga pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Sasaran 3, Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan dengan indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2025 mencapai 89,32 dari target 88,87 dengan tingkat capain sebesar 100,51%. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Sasaran 4, Meningkatnya keselamatan transportasi dengan indikator sasaran *Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2025 mencapai 111 kejadian dari target 164 kejadian dengan capain 132,32%, sehingga

pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Sasaran 5, Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2025 mencapai 86,35 dari target 85,93 dengan tingkat capaian 100,49%. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja sasaran tersebut, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2025 termasuk kategori Sangat Berhasil, dengan nilai capaian kinerja **106,31%**.

Pada tahun 2025 Anggaran Belanja yang teralokasi untuk Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 sebesar Rp 19.839.666.628,00 (*Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) dan terserap Rp. 18.504.664.294,00 (*Delapan Belas Milyar Lima Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) atau sebesar **93,27%** dari jumlah pagu.

Mengacu pada capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025 maka efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 sebesar **1,14**.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025 dapat dikatakan Sangat Berhasil, namun demikian masih tetap dijumpai beberapa kendala/ hambatan dalam pelaksanaannya baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja Perangkat Daerah diantaranya: masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan; masih kurangnya armada

angkutan sekolah gratis; belum tersedianya data base prasarana perhubungan; tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran marka serta rambu lalu lintas yang salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran pengguna jalan akan lalu lintas berkeselamatan; serta belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dalam upaya peningkatan pencapaian kinerja perangkat daerah .

B. Langkah Perbaikan

Langkah Perbaikan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi, ada beberapa langkah strategi yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasarana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai/standar berdsarakan data kebutuhan;
2. Optimalisasi pengelolaan Terminal tipe C;
3. Optimalisasi ketersediaan armada angkutan sekolah gratis;
4. Optimalisasi kinerja juru parkir tepi jalan umum;
5. Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas kepada pengguna jalan;
6. Mengoptimalkan penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan identifikasi terhadap rencana aksi untuk memastikan ketercapaian kinerja perangkat daerah.

Adapun rencana tindak lanjut dan time line pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang Dihadapi	Strategi/ Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan secara berkelanjutan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	- Minimal persentase perlengkapan jalan yang laik fungsi 88,50% - Meningkatnya jumlah PJU dan rambu lalu lintas	√	√	√
2	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas fasilitas utama serta penunjang Terminal Tipe C	Melaksanakan pembangunan/ pemeliharaan lanjutan fasilitas utama/ penunjang Terminal Tipe c	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	- Persentase sarpras angkutan sesuai standar minimal 94,90%		√	√

No	Permasalahan/ Kendala yang Dihadapi	Strategi/ Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
3	Kurang optimalnya layanan angkutan sekolah gratis yang dikarenakan keterbatasan jumlah armada dan kurangnya pengendalian operasional di lapangan	Penyediaan armada angkutan sekolah	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kondisi armada angkutan sekolah laik dan berkeselamatan - Load factor angkutan sekolah minimal 0,65	√	√	√
		Pengendalian dan pengawasan operasionalisasi angkutan sekolah	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- IKM Layanan angkutan sekolah minimal 90 (sangat baik)	√	√	√
4	Kurangnya kedisiplinan juru parkir dalam melakukan penataan dan pemungutan retribusi parkir	Pengawasan, Penertiban, dan pembinaan juru parkir	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Persentase juru parkir yang mentaati SOP parkir 83% - Peningkat PAD atas retribusi parkir 86% dari target yang ditetapkan	√	√	√

No	Permasalahan/ Kendala yang Dihadapi	Strategi/ Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
5	Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas	Sosialisasi edukasi kelalulintasan kepada pengguna jalan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya	√	√	√
6	Kurangnya optimalisasi pencapaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadinya peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	Mereviu dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai kriteria SMART	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	- Persentase perencanaan kinerja pada Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi minimal 90% - Ukuran keberhasilan sasaran telah memenuhi kriteria SMART dengan predikat minimal B	√	√	√

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Blitar, sehingga secara bersama-sama kita bisa membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah menuju peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 9 Februari 2026

**Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar**

EDI WINARNO, S.Sos.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700125 199101 1 001

Lampiran-lampiran

- I. Matrik Rencana Strategi OPD Tahun 2021-2026
- II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2025
- III. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- IV. Pengukuran Kinerja Tahun 2025



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

MISI 4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal 2020	Target 2025	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal 2020	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kualitas perhubungan	Level Of Service (LOS)	v/c ratio kinerja ruas jalan	B 0,22	B 0,25	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	99,35%	96%	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal	
											Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai	
										Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
					Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap	80,11	88,87	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
											Optimalisasi layanan angkutan sekolah	
					Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	443 kejadian	164 kejadian	Optimalisasi layanan keselamatan berlalulintas	Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT	
											Optimalisasi pengelolaan parkir	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	A 84,79	A 85,93	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	A 84,79	A 85,93	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas	
											Penertiban pelanggaran lalu lintas	
											Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	
											Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	



Blitar, 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**

JUARI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651204 198603 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN (PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
1	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,93	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,77	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	8.800.000,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	3.200.000,00			
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	5.619.453.160,59
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.584.400,00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	116.678.600,00
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 orang	136.451.300,00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.760.100,00
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	17.785.000,00
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	13.668.000,00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	58.252.000,00
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.098.000,00
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	101.498.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	26.050.000,00										

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	11.606.200,00
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	46.761.000,00
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	222.609.000,00
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	462.449.104,00
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	378.833.160,00
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 unit	33.335.000,00
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	44.428.000,00
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.050.000,00
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	96%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,60%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	3 jenis	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	16 unit	306.774.784,00
										Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	52.005.690,00
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	5.806 unit	5.691.797.658,61
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	24 unit	517.453.100,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	95%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	16 jenis	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0 unit	0,00
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	4 unit	25.076.600,00
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	164 kejadian	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	0,30	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	2 kajian	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	2.009.335.442,00
										Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	257.050.500,00
										Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	7 dokumen	208.968.000,00
										Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	1 laporan	91.961.400,00
4	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Baik 88,87	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1068690756	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	90,92 Sangat Baik	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	88,89%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	9 unit	664.867.400,00
										Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	1.068.690.756,00
					IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	92,20 Sangat Baik	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	96,68%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	4.600 unit	29.048.600,00
										Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1.000 dokumen	25.000.000,00
										Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 unit	122.326.718,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	83,49 Baik	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	80,77%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	1.429.159.954,80
TOTAL ANGGARAN													19.839.666.628,00

Blitar, 20 Oktober 2025


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR
JUARI, S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651204 198603 1006

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUARI, S.H., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

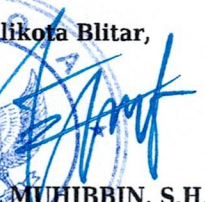
Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar,

JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196512041986031006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	0.25(Nilai)
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	96.00(%)
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	164.00(Kejadian)
4	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan masyarakat layanan perhubungan	88.87(Nilai)
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.93(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12,499,516,603.41	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,340,150,024.59	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Bagi Hasil
Total:		19,839,666,628.00	

Walikota Blitar,

SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar.

JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196512041986031006

**PENGUKURAN KINERJA ESELON II
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi Kinerja					Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	V/C Ratio Pada Tahun n	0.25	0.2800	0.2800	0.2500	0.2500	0.2500	Hasil Kajian Kinerja Ruas Jalan Tahun 2025
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	85.93	85.9300	85.9300	86.3500	86.3500	86.3500	Nilai SAKIP PD tahun 2025
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	96.00	95.3200	96.0600	96.0100	96.0000	96.0000	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik 96,64%; persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik 98,94%; persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik 93,68%; dan persentase sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik 94,74%.
Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	164.00	18.0000	25.0000	24.0000	44.0000	111	Data laka lantas Tahun 2025
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan masyarakat layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	88.87	89.4300	90.3400	90.6800	89.3200	89.3200	Nilai IKM pada SUKMA E-Jatim periode 1 Januari sd 5 Desember 2025 (IKM layanan uji kendaraan bermotor 92,59; IKM layanan angkutan sekolah gratis 89,96; dan IKM Layanan parkir tepi jalan umum 85,41)

Blitar, 5 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar,
EDI WINARNO, S.Sos.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 197001251991011001